

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik merupakan bidang akuntansi dengan mengutamakan kebutuhan dan kepuasan pelayanan publik dan tidak mengedepankan profit atau keuntungan. Artinya, bidang akuntansi ini lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan publik atau masyarakat dan mengesampingkan pendapatan berupa keuntungan atau laba. Disebut sebagai sektor publik karena akuntansi ini diterapkan oleh lembaga-lembaga publik seperti pemerintah pusat yang membawahi Pemerintah Daerah (Pemda), Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan sosial, ataupun konstruksi kerja sama sektor publik maupun swasta (Bastian, 2006).

Indonesia mengalami perkembangan pada bidang akuntansi sektor publik yang membuat masyarakat menuntut penyelenggaraan pemerintah yang baik sehingga hal tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah dalam penerapan akuntabilitas publik sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah atas kinerjanya. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dilakukan dengan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan pemerintah. Karena pada dasarnya *output* dari akuntansi adalah laporan keuangan, maka bidang akuntansi sektor publik tetap harus melakukan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan terutama demi kepentingan masyarakat. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam suatu periode. Hal ini berarti baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah wajib bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan publik yang disampaikan dalam bentuk laporan keuangan.

Laporan keuangan yang baik dicerminkan oleh kualitasnya laporan keuangan. Secara umum, pelaporan keuangan berkualitas artinya pelaporan yang memenuhi karakteristik kualitatif yang terdiri dari relevansi (*relevance*), penyampaian jujur (*faithfull representation*), dapat diverifikasi (*verifiability*),

keterbandingan (*comparability*), ketepatan waktu (*timeliness*), dan mampu dipahami (*understandability*). Pelaporan keuangan yang berkualitas berarti bahwa pelaporan keuangan dapat memenuhi keinginan pengguna atas informasi keuangan yang disajikan (Jonas dan Blanchet, 2000). Suatu laporan keuangan disebut berkualitas jika karakteristik kualitatif informasi keuangan tersebut terpenuhi (Beest et al., 2009).

Penerapan yang baik atas regulasi atau standar yang ditetapkan dapat menjadi indikator kualitas laporan keuangan. Baiknya tata kelola pemerintahan dapat ditinjau dari laporan keuangan yang berkualitas (Nasution et al., 2020). PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa SAP ialah pedoman yang diimplementasikan saat laporan keuangan pemerintah disusun dan disajikan. Selain itu, dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah disebut berkualitas apabila memiliki nilai relevansi, keandalan, keterbandingan, serta dapat dipahami sebagai elemen dari karakteristik kualitatif laporan keuangan. Pengimplementasian SAP pada laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan syarat berkekuatan hukum untuk mengoptimalkan kualitas laporan tersebut.

Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) juga dapat mendorong peningkatan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. SIA diartikan sebagai suatu elemen yang bertanggungjawab atas penyajian informasi keuangan guna mempermudah manajemen untuk menentukan keputusan dalam organisasi. Tentunya pihak dalam maupun luar organisasi membutuhkan informasi keuangan tersebut (Tawaqal dan Suparno, 2017). Sehingga, SIA yang memadai mampu mendukung kegiatan penyiapan laporan keuangan pemerintah. Pemanfaatan SIA berupa aplikasi komputer akuntansi pada pemerintahan sangat berperan penting karena mampu membantu aparatur pemerintah untuk menyusun laporan keuangan. Bentuk pemanfaatan SIA di lingkungan pemerintah khususnya Pemda didasarkan pada PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). SIKD ialah sistem untuk pencatatan, pengelolaan, serta pengolahan data keuangan daerah. Nantinya data tersebut akan disampaikan kepada publik sebagai informasi pengelolaan keuangan daerah. Selain itu,

informasi tersebut berguna untuk acuan ketika mengambil keputusan guna penganggaran, penyelenggaraan, dan pelaporan akuntabilitas pemerintah daerah. Sehingga, pemanfaatan SIA akan berperan penting bagi kualitas laporan keuangan.

Selain implementasi SAP dan penggunaan SIA, kualitasnya laporan keuangan pemerintah juga dapat ditentukan oleh Sistem Pengendalian Internal (SPI). Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah dikelola atas dasar SPI yang memadai serta akuntansi keuangan dilakukan berdasarkan SAP. Hal tersebut harus dinyatakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/barang. Artinya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus berpedoman pada SPI dan SAP yang berlaku. Sehingga SPI berguna sebagai pemberi validitas tercapainya efektivitas serta efisiensi dalam proses akuntansi. Oleh karena itu, SPI dapat menambah peningkatan reliabilitas, objektivitas informasi, serta mempermudah pemeriksaan laporan keuangan. Kesulitan dalam mendeteksi *accounting fraud* bisa menimbulkan bukti audit yang tidak relevan akibat dari rendahnya pengendalian internal.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa Wajar Tanpa Pengecualian dapat menjadi bukti dari kualitas laporan keuangan pemerintah. Pemberian opini oleh BPK atas hasil pemeriksaan atau audit laporan keuangan pemerintah pada tiap periode mencerminkan kualitas penyajian dan pengelolaan laporan keuangan. Pemberian opini berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Bukti hasil audit tersebut dipublikasikan melalui *webiste* resmi BPK (<https://www.bpk.go.id/ihps>) serta *website-website* resmi pemerintah daerah tiap kabupaten/kota. Hasil pemeriksaan tersebut terangkum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS).

Tabel 1.1 Opini LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020

| Nama Entitas | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------|------|------|------|------|------|
| Kabupaten Banyuwangi | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |

Sumber: IHPS Semester I Tahun 2021

Tabel di atas menggambarkan bahwa Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang memperoleh opini WTP selama 5 tahun berturut (2016-2020). Hal ini berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi mempunyai kualitas laporan keuangan yang baik karena berhasil mempertahankan opini WTP. Tetapi, LKPD Kabupaten Banyuwangi tidak sepenuhnya terlepas dari permasalahan meskipun telah mendapatkan opini tersebut. Sebagai contoh, berdasarkan IHPS tersebut, disebutkan bahwa terdapat permasalahan berupa ketidakpatuhan atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) berupa pertanggungjawaban yang tidak dilampiri dengan kelengkapan bukti pada Kementerian Ketenagakerjaan atas bantuan program pelatihan pada Balai Latihan Kerja dan Balai Latihan Kerja Komunitas Kabupaten Banyuwangi. Kemudian terdapat pula permasalahan berupa proses penyusunan laporan yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Ketidaksesuaian tersebut antara lain: 1) Badan Pendapatan Daerah belum melaksanakan validasi hasil pelimpahan pajak pusat berupa data piutang Pajak Bumi dan Bangunan; 2) Belum dilakukan rekonsiliasi pencatatan pada Kartu Inventaris Barang (KIB) D dengan tanah di bawahnya pada KIB A atas jalan, irigasi, dan bangunan air; 3) Dokumen rekonsiliasi pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan operasional sekolah belum memiliki format baku; 4) Data calon penerima bantuan pemerintah belum sinkron dengan sistem informasi administrasi kependudukan dan *database smart* kampung; dan 5) Tidak adanya validasi pada proses reklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain.

Beberapa permasalahan tersebut menggambarkan bahwa meskipun LKPD mendapat opini WTP, laporan keuangan tersebut tetap memiliki kesalahan. Artinya, berkualitasnya sebuah laporan keuangan belum tentu terhindar dari hal-hal yang bisa membuat kualitas laporan tersebut menurun.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi”. Organisasi perangkat daerah di Kabupaten Banyuwangi sebagai objek penelitian menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah Kabupaten Banyuwangi?
2. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah Kabupaten Banyuwangi?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah Kabupaten Banyuwangi?

1.3 Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah Kabupaten Banyuwangi.
2. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah Kabupaten Banyuwangi.
3. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat

Sesuai dengan tujuan yang sudah dibuat, maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Bagi Peneliti

Menjadi sarana penambah wawasan peneliti serta pengimplementasian teori-teori yang sudah diperoleh selama perkuliahan. Selain itu penelitian ini berguna untuk mengetahui seberapa besar kualitas laporan keuangan OPD di Kabupaten Banyuwangi yang dipengaruhi oleh penerapan SAP, pemanfaatan SIA, dan SPI.

2. Manfaat Bagi Pemerintah Daerah

Menjadi sarana atau bahan pendukung peningkatan kualitas LKPD Kabupaten Banyuwangi.

3. Manfaat Bagi Pembaca

Memberikan hasil yang dapat menambah pengetahuan bagi pembaca. Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti lain terkait dengan pengaruh penerapan SAP, pemanfaatan SIA, dan SPI terhadap kualitas laporan keuangan.